



Membangun Ekonomi Nasional dengan Landasan Akhlaq Islami dan Hukum Islam

Sarwo Edy¹, Septiayu R Wulandari² Daffa Abdul Hafizh³

¹FAI Universitas Pelita Bangsa, ²FIPHUM Universitas Pelita Bangsa, ³IAI Pangeran Dharma Kusuma Indramayu

sarwoedy@pelitabangsa.ac.id, septiayurwulandari@pelitabangsa.ac.id,
dafa@staisdharma.ac.id

DOI : <https://doi.org/10.55656/tjmes.v6i2.250>

Disubmit: (Juli 2024) | Direvisi: (Juli 2024) | Disetujui: (Juli 2024)

Abstract

Sustainable national economic development requires a strong foundation, not only technically and policy-wise but also ethically. This article discusses the importance of building a national economy based on Islamic morals and laws. The application of Islamic moral values in economic practices can create a more inclusive and sustainable economy. Similarly, Islamic law provides guidelines for transactions and fair wealth distribution. By integrating these principles, society can create a balanced and just economic environment, where blessings and prosperity are evenly distributed. The research findings indicate that Islamic moral and legal economic concepts, such as joint ownership, distributive justice, and prohibition of usury, are highly relevant in the context of national economic development. Some countries have attempted to implement Islamic economic principles in their national policies, though challenges remain. These challenges include mismatches with the dominant global economic system, lack of public understanding and awareness of Islamic moral values, and difficulties in balancing Islamic economic principles with modern economic needs. Despite these challenges, building a national economy on Islamic morals and laws holds significant potential benefits, including a more stable and sustainable financial system, reduced economic inequality, improved public welfare, and strengthened social and moral bonds within society.

Keywords: National economy, Islamic ethics, Islamic law, inclusive, sustainable.

Abstrak

Pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan memerlukan landasan yang kuat, baik dari segi teknis maupun nilai-nilai etis. Artikel ini membahas pentingnya akhlaq Islami dan hukum Islam dalam pembangunan ekonomi nasional. Penerapan nilai-nilai akhlaq Islami dapat menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sementara hukum Islam memberikan pedoman transaksi dan distribusi kekayaan yang adil. Penelitian menunjukkan bahwa konsep ekonomi berbasis akhlaq Islami dan hukum Islam, seperti kepemilikan bersama, keadilan distributif, dan larangan riba, relevan dalam konteks pembangunan



<https://ojs.staisdharma.ac.id/index.php/tjmes>



ekonomi nasional. Beberapa negara telah mencoba menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, meskipun menghadapi tantangan seperti ketidaksesuaian dengan sistem ekonomi global, kurangnya pemahaman masyarakat, dan kesulitan menyeimbangkan prinsip ekonomi Islam dengan kebutuhan modern. Meskipun demikian, pembangunan ekonomi dengan landasan akhlaq Islami dan hukum Islam berpotensi memberikan manfaat besar, termasuk sistem keuangan yang stabil, pengurangan ketimpangan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penguatan ikatan sosial dan moral.

Kata kunci: Ekonomi nasional, akhlaq Islami, hukum Islam, inklusif, berkelanjutan.

Pendahuluan

Ekonomi nasional suatu negara adalah fondasi dari kesejahteraan dan kemajuan bangsa tersebut (Putra, 2021). Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan menjadi tujuan utama bagi banyak negara, karena hal ini tidak hanya mencakup pertumbuhan ekonomi yang stabil, tetapi juga distribusi yang adil dan keberlanjutan lingkungan. Namun, dalam menggapai tujuan tersebut, banyak negara menghadapi tantangan kompleks, termasuk ketimpangan ekonomi, ketidakstabilan pasar, dan kerusakan lingkungan.

Di tengah kompleksitas ini, nilai-nilai moral dan etis menjadi semakin penting sebagai landasan untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Suradi, 2012). Dalam konteks ini, ajaran Islam menawarkan pandangan yang kaya dan relevan. Akhlaq Islami (etika Islam) dan hukum Islam memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana manusia harus berinteraksi dalam urusan ekonomi, termasuk aspek-aspek seperti kepemilikan, produksi, distribusi, dan konsumsi.

Etika dan moralitas bukanlah hal yang bersifat opsional dalam konteks ekonomi. Sebuah ekonomi yang sukses harus memperhitungkan implikasi etis dari kebijakan dan tindakan ekonomi. Akhlaq Islami menawarkan kerangka kerja yang kaya untuk menilai dan mengarahkan perilaku ekonomi. Prinsip-prinsip Islam sering kali sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, seperti keadilan sosial, keberagaman, dan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab (Maria Helena Andre, et. all., 2018). Kajian terhadap bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diintegrasikan dalam kebijakan ekonomi nasional akan memberikan wawasan berharga tentang cara mencapai tujuan pembangunan yang holistik.

Hukum Islam, atau syariah, memberikan pedoman yang spesifik tentang bagaimana transaksi ekonomi harus dilakukan (Maulana, 2020). Ini termasuk prinsip-prinsip seperti larangan riba (bunga), perdagangan yang adil, dan distribusi yang merata. Memahami dan menerapkan hukum Islam dalam konteks ekonomi nasional dapat meningkatkan keadilan dan keberlanjutan.

Meskipun nilai-nilai Islam memiliki potensi besar dalam membentuk ekonomi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan, tantangan dalam mengimplementasikan nilai-nilai ini

<https://ojs.staisdharma.ac.id/index.php/times>



tetap ada (Hasan et al., 2024). Misalnya, bagaimana menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam ekonomi yang modern dan kompleks, di mana faktor-faktor seperti globalisasi dan teknologi memainkan peran penting? Sejumlah negara dengan mayoritas penduduk Muslim telah mencoba menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam kebijakan ekonomi mereka. Melalui studi kasus dan analisis mendalam terhadap pengalaman negara-negara seperti Malaysia, Indonesia, dan Arab Saudi, dapat ditemukan pelajaran berharga tentang keberhasilan, tantangan, dan peluang dalam menerapkan ekonomi berbasis Islam.

Urgensi penelitian tentang membangun ekonomi nasional dengan landasan akhlaq islami dan hukum Islam antara lain: (i) Ketidakseimbangan ekonomi global menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh banyak negara, terutama negara-negara berkembang. Perbedaan besar antara negara-negara kaya dan miskin, serta dominasi ekonomi oleh beberapa kekuatan utama, mengindikasikan perlunya pendekatan baru dalam pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan adil. (ii) Krisis kemanusiaan seperti kelaparan, kemiskinan, dan ketimpangan sosial masih menjadi realitas yang menghantui banyak negara. Di tengah kekayaan dan kemajuan teknologi, masih banyak orang yang hidup dalam kondisi ekonomi yang sangat sulit. Pemikiran baru yang mengintegrasikan nilai-nilai moral dan etis menjadi semakin mendesak dalam menanggapi tantangan ini. (iii) Kerusakan lingkungan yang semakin parah menuntut adanya perubahan mendalam dalam pola konsumsi dan produksi. Pembangunan ekonomi yang hanya didasarkan pada pertumbuhan ekonomi tanpa memperhitungkan dampak lingkungan tidak dapat berkelanjutan dalam jangka panjang. Akhlaq Islami dan hukum Islam memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana manusia harus berinteraksi dengan lingkungan alam. (iv) Krisis keuangan global yang terjadi pada awal abad ke-21 menunjukkan bahwa sistem keuangan yang tidak diatur dengan baik dapat memiliki dampak yang merugikan bagi masyarakat luas. Perlunya etika dalam bisnis menjadi semakin penting untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan dan tidak bertanggung jawab dalam dunia ekonomi. (v) Model-model pembangunan ekonomi yang hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi tidak lagi memadai dalam mengatasi kompleksitas tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dihadapi oleh dunia saat ini. Perlunya pembaruan paradigma menuju pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan adil menjadi semakin mendesak. (vi) Di tengah globalisasi dan modernisasi, pengakuan terhadap peran nilai-nilai agama, termasuk Islam, dalam membentuk masyarakat dan ekonomi semakin meningkat. Nilai-nilai etis dan moral yang terkandung dalam ajaran agama menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang dalam membangun sebuah masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan. (vii) Sejumlah negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi berbasis pada nilai-nilai Islam. Potensi ini termasuk sumber daya alam yang kaya, populasi yang besar, dan warisan budaya yang kaya. Namun, potensi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan, dan penelitian tentang bagaimana mengoptimalkan pemanfaatan potensi ini menjadi penting. (viii) Masyarakat di berbagai belahan dunia semakin menyadari pentingnya etika dan moralitas dalam pembangunan ekonomi. Permintaan akan produk dan layanan yang diproduksi secara bertanggung jawab dan etis semakin meningkat. Penelitian tentang pembangunan ekonomi

<https://ojs.staisdharma.ac.id/index.php/tjmes>



dengan landasan akhlaq Islami dan hukum Islam dapat memberikan kontribusi besar dalam memenuhi permintaan ini.

Permasalahan tentang membangun ekonomi nasional dengan landasan akhlaq islami dan hukum Islam antara lain: (i) Ketimpangan ekonomi yang semakin memperdalam divisi antara kaya dan miskin menjadi salah satu permasalahan utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Tantangan ini memerlukan pendekatan yang berbasis pada keadilan dan inklusivitas untuk mengatasi disparitas yang ada. (ii) Krisis moral dan etika dalam dunia bisnis dan ekonomi sering kali memunculkan perilaku tidak bermoral, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Pentingnya mengembangkan sebuah kerangka kerja yang berlandaskan pada nilai-nilai moral dan etis dalam praktik ekonomi menjadi semakin mendesak. (iii) Keterbatasan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan yang semakin parah menuntut adanya perubahan mendalam dalam cara kita memandang dan memanfaatkan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab menjadi krusial untuk menjaga keberlanjutan ekonomi dan lingkungan. (iv) Krisis keuangan global yang terjadi secara periodik menyoroti kelemahan dalam sistem keuangan yang ada. Ketidakstabilan pasar dan ketidakpastian ekonomi membutuhkan pendekatan yang lebih bijaksana dan bertanggung jawab dalam mengelola risiko-risiko yang ada.

Tujuan tentang membangun ekonomi nasional dengan landasan akhlaq islami dan hukum Islam antara lain: (i) Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan sebuah model ekonomi nasional yang berkelanjutan, yang memperhitungkan kebutuhan generasi masa depan tanpa mengorbankan kepentingan generasi saat ini. (ii) Tujuan lainnya adalah untuk mengintegrasikan nilai-nilai akhlaq Islami dan hukum Islam dalam kebijakan ekonomi nasional. Ini meliputi aspek-aspek seperti keadilan distributif, larangan riba (bunga), dan perlindungan lingkungan. (iii) Salah satu tujuan penting adalah untuk mendorong praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab. Ini termasuk menghindari praktik-praktik korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan eksploitasi sumber daya alam. (iv) Tujuan lainnya adalah untuk memfasilitasi pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui distribusi yang adil dari hasil ekonomi nasional. Ini termasuk upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antara berbagai kelompok masyarakat. (v) Penelitian ini juga bertujuan untuk menyediakan rujukan yang berguna bagi pembuat kebijakan dalam merancang kebijakan ekonomi yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan berlandaskan pada nilai-nilai moral dan etis.

Kegunaan penelitian tentang membangun ekonomi nasional dengan landasan akhlaq islami dan hukum Islam antara lain: (i) Penelitian ini dapat menjadi katalisator untuk mendorong reformasi ekonomi nasional yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Ini dapat melibatkan perubahan dalam kebijakan ekonomi, regulasi bisnis, dan praktik-praktik korporat. (ii) Penelitian ini juga dapat memberikan pedoman yang berguna bagi pelaku bisnis dan investasi dalam mempraktikkan bisnis yang bertanggung jawab dan etis. Ini dapat membantu mengubah budaya bisnis menuju arah yang lebih berkelanjutan dan adil. (iii) Penelitian ini juga dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya etika dan moralitas dalam ekonomi. Dengan demikian, ini dapat mempengaruhi



<https://ojs.staisdharma.ac.id/index.php/times>



perilaku konsumen dan memberikan tekanan pada perusahaan dan pemerintah untuk bertindak secara lebih bertanggung jawab. (iv) Penelitian ini dapat menjadi titik awal untuk membangun kerja sama dan kolaborasi antarwilayah dan antarbangsa dalam mengatasi tantangan-tantangan ekonomi yang kompleks. Ini dapat melibatkan pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya untuk mencapai tujuan bersama. (v) Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan adil, diharapkan akan tercipta masyarakat yang lebih sejahtera dan harmonis.

Dengan mempertimbangkan latar belakang dan rasionalisasi di atas, penelitian tentang pembangunan ekonomi nasional dengan landasan akhlaq Islami dan hukum Islam menjadi relevan dan bermanfaat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana nilai-nilai etis dan prinsip-prinsip agama dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Dengan mempertimbangkan urgensi-urgensi di atas, penelitian tentang pembangunan ekonomi nasional dengan landasan akhlaq Islami dan hukum Islam menjadi semakin penting dan relevan dalam menghadapi tantangan-tantangan kompleks yang dihadapi oleh dunia saat ini. Integrasi nilai-nilai moral dan etis dalam pembangunan ekonomi dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil, berkelanjutan, dan sejahtera bagi semua.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kualitatif yang menggabungkan pendekatan deskriptif dan analisis komparatif (J. Moleong, 2013). Pendekatan ini memungkinkan kami untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep ekonomi nasional berbasis akhlaq Islami dan hukum Islam serta menganalisis perbedaan dan kesamaan antara berbagai implementasi di negara-negara yang berbeda.

Sasaran utama penelitian ini adalah para pembuat kebijakan, praktisi bisnis, akademisi, dan masyarakat umum yang tertarik dalam pembangunan ekonomi berbasis akhlaq Islami dan hukum Islam. Melalui penelitian ini, kami berharap dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi mereka dalam merancang kebijakan, mengelola bisnis, dan berpartisipasi dalam diskusi tentang ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Subjek penelitian meliputi berbagai kebijakan ekonomi nasional yang telah diterapkan dalam konteks akhlaq Islami dan hukum Islam di negara-negara yang menjadi fokus penelitian, serta praktik bisnis yang mencerminkan nilai-nilai etis dan moral dalam ekonomi.

Prosedur penelitian yang dilakukan adalah (i) melakukan studi literatur yang menyeluruh tentang konsep-konsep ekonomi berbasis akhlaq Islami dan hukum Islam, serta implementasinya dalam berbagai negara. (ii) Data akan dikumpulkan melalui berbagai sumber, termasuk dokumen resmi pemerintah, laporan keuangan perusahaan, wawancara dengan ahli ekonomi dan ulama, serta survei kepada masyarakat. (iii) Data yang terkumpul

<https://ojs.staisdharma.ac.id/index.php/tjmes>



akan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif, dengan memperhatikan konteks budaya, sosial, dan ekonomi dari masing-masing negara. Teknik analisis data akan mencakup pengkodean tematik dan analisis komparatif (Leavy, Patricia (ed.), 2020).

Instrumen dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara, yaitu (i) Wawancara. Wawancara akan dilakukan dengan para pembuat kebijakan, praktisi bisnis, akademisi, dan tokoh masyarakat untuk mendapatkan pandangan mereka tentang konsep ekonomi berbasis akhlaq Islami dan hukum Islam serta pengalaman mereka dalam menerapkannya. (ii) Analisis dokumen. Dokumen-dokumen resmi pemerintah, laporan keuangan perusahaan, dan literatur akademis akan dianalisis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang kebijakan ekonomi nasional dan praktik bisnis yang relevan. (iii) Survei. Survei akan dilakukan kepada masyarakat untuk mengukur tingkat kesadaran dan penerimaan terhadap konsep ekonomi berbasis akhlaq Islami dan hukum Islam, serta perilaku konsumen yang mencerminkan nilai-nilai moral dalam ekonomi. Data kualitatif akan dianalisis menggunakan pendekatan pengkodean tematik, di mana tema-tema utama akan diidentifikasi dari data yang terkumpul. Selanjutnya, analisis komparatif akan digunakan untuk membandingkan dan mengontraskan implementasi ekonomi berbasis akhlaq Islami dan hukum Islam di berbagai Negara (Rofiqoh & Zulhawati, 2020).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pembangunan ekonomi nasional dengan landasan akhlaq Islami dan hukum Islam menjadi semakin relevan dalam menghadapi kompleksitas tantangan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dihadapi oleh banyak Negara (Bappenas, 2018). Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang konsep-konsep ekonomi berbasis akhlaq Islami dan hukum Islam serta menganalisis implementasinya dalam konteks berbagai negara. Berikut adalah hasil penelitian yang diperoleh:

1. Konsep-Konsep Ekonomi Berbasis Akhlaq Islami dan Hukum Islam

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan mendeskripsikan konsep-konsep ekonomi yang berlandaskan akhlaq Islami dan hukum Islam. Ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada aspek material, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai moral dan etika yang tertuang dalam ajaran Islam (Chapra, 2000). Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam prinsip-prinsip ekonomi Islam serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari (El-Gamal, 2006).

Adapun konsep-konsep ekonomi yang berlandaskan akhlaq Islami dan hukum Islam antara lain: (i) Keseimbangan (*Mizan*). Ekonomi Islam menekankan pentingnya keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual. Keseimbangan ini tercermin dalam konsep distribusi kekayaan yang adil dan merata. (ii) Keadilan (*'adalah*). Keadilan merupakan salah satu pilar utama dalam ekonomi Islam. Sistem ekonomi harus memastikan tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan, serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu.

(iii) Kesejahteraan sosial (*masalah*). Ekonomi Islam berfokus pada pencapaian kesejahteraan sosial yang luas, bukan hanya bagi individu tetapi juga komunitas. Hal ini termasuk perlindungan terhadap yang lemah dan pemberian zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan. (iv) Larangan riba. Riba atau bunga dilarang dalam ekonomi Islam karena dianggap sebagai eksploitasi yang tidak adil. Sebagai gantinya, Islam mendorong penggunaan sistem bagi hasil yang lebih adil dan transparan (Warde, 2000). (vi) Kepemilikan. Dalam Islam, kepemilikan bukanlah hak mutlak individu tetapi bersifat amanah dari Allah. Oleh karena itu, penggunaan harta harus sesuai dengan hukum-hukum syariah dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Konsep hukum Islam dalam ekonomi dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut: (i) Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan. Zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan dan penyeimbang ekonomi. Zakat harus dikelola dengan transparan dan diberikan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan syariah (Kahf, 1999). (ii) Infaq dan sedekah. Selain zakat, Islam juga mendorong umatnya untuk memberikan infaq dan sedekah. Ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan bentuk ibadah yang membantu mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. (iii) Wakaf adalah pemberian aset untuk kepentingan umum yang dikelola secara berkelanjutan. Wakaf memiliki potensi besar dalam pembangunan ekonomi, terutama dalam penyediaan fasilitas publik seperti pendidikan dan kesehatan.

Ekonomi Islam menawarkan alternatif terhadap sistem ekonomi konvensional yang sering kali mengejar keuntungan tanpa mempertimbangkan aspek moral dan etika (Siddiqi, 1981). Nilai-nilai seperti keadilan, kesejahteraan sosial, dan larangan riba mencerminkan upaya Islam untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih manusiawi dan berkelanjutan.

Konsep zakat, infaq, dan wakaf menunjukkan bagaimana Islam mengatur distribusi kekayaan dan mengurangi ketimpangan sosial. Implementasi konsep-konsep ini dalam kehidupan modern dapat menghadapi tantangan, namun dengan pengetahuan dan pemahaman yang tepat, prinsip-prinsip ini dapat diterapkan untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan seimbang (Kahf, 1999).

Konsep ekonomi berbasis akhlaq Islami dan hukum Islam menekankan pentingnya keseimbangan, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Melalui instrumen seperti zakat, infaq, dan wakaf, Islam menawarkan solusi konkret untuk masalah ekonomi dan sosial. Penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam relevan dan dapat diterapkan dalam konteks modern untuk mencapai tujuan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan (Lewis & Latifa M, 2001).

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur tentang ekonomi Islam dan menjadi referensi bagi penelitian lebih lanjut dalam bidang ini. Studi literatur dan wawancara dengan para ahli mengungkapkan bahwa ada beberapa konsep kunci dalam ekonomi berbasis akhlaq Islami dan hukum Islam. Salah satunya adalah konsep kepemilikan yang ditekankan dalam Islam. Hukum Islam mengatur bahwa sumber daya alam adalah pemberian Allah dan bahwa manusia bertanggung jawab

atas pengelolannya dengan adil. Prinsip-prinsip seperti kepemilikan bersama, keadilan distributif, dan larangan riba juga menjadi fokus dalam ekonomi Islam. Ekonomi Islam didasarkan pada beberapa prinsip utama yang membedakannya dari paradigma ekonomi konvensional. Salah satunya adalah konsep kepemilikan yang ditekankan dalam Islam. Menurut ajaran Islam, sumber daya alam adalah pemberian Allah yang harus dikelola dengan adil oleh manusia. Hal ini mengarah pada prinsip kepemilikan bersama dan keadilan distributif dalam pembagian sumber daya.

Selain itu, ekonomi Islam juga menekankan larangan riba (bunga) dan praktik-praktik spekulatif yang dianggap merugikan masyarakat. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi ekonomi dilakukan dengan cara yang adil dan tidak merugikan pihak lain. Selain itu, konsep zakat (sumbangan amal) juga merupakan bagian integral dari ekonomi Islam, di mana kekayaan dipertahankan dan didistribusikan secara merata kepada mereka yang membutuhkan.

2. Implementasi dalam Kebijakan Ekonomi Nasional

Implementasi kebijakan ekonomi nasional merupakan proses yang kompleks dan multifaset, melibatkan berbagai aktor, institusi, dan mekanisme. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi implementasi kebijakan ekonomi nasional di Indonesia serta dampaknya terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian tentang implementasi kebijakan ekonomi nasional antara lain sebagai berikut: (i) keterlibatan pemangku kepentingan. Wawancara menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ekonomi sangat dipengaruhi oleh keterlibatan pemangku kepentingan. Partisipasi aktif dari sektor swasta, masyarakat sipil, dan pemerintah daerah penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan relevan dan efektif. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan sebelumnya yang menekankan pentingnya partisipasi pemangku kepentingan dalam implementasi kebijakan (Fischer, F, 2003). Partisipasi ini memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. (ii) Koordinasi antar-instansi. Analisis dokumen kebijakan mengungkapkan bahwa koordinasi yang efektif antar instansi pemerintah merupakan faktor kunci. Kurangnya koordinasi sering mengakibatkan tumpang tindih kebijakan dan inefisiensi. Penerapan kebijakan yang terintegrasi dan koheren antara kementerian dan lembaga pemerintah meningkatkan efektivitas implementasi. Koordinasi yang efektif antar instansi pemerintah adalah prasyarat penting untuk implementasi kebijakan yang berhasil. Penelitian ini mendukung pandangan bahwa fragmentasi birokrasi dapat menghambat implementasi kebijakan (Pressman, J. L., & Wildavsky, A. B, 1984). (iii) Kapabilitas institusional. Kapabilitas institusional, termasuk kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur, juga mempengaruhi implementasi kebijakan. Penelitian ini menemukan bahwa institusi dengan kapabilitas yang lebih tinggi cenderung lebih berhasil dalam menerapkan kebijakan ekonomi. Kapabilitas institusional yang kuat mendukung implementasi kebijakan dengan menyediakan sumber daya yang diperlukan dan keahlian teknis. Temuan ini konsisten

<https://ojs.staisdharma.ac.id/index.php/times>



dengan studi yang menunjukkan bahwa kapabilitas institusional adalah faktor kunci dalam implementasi kebijakan (Grindle, M. S., & Thomas, J. W, 1991). (iv) Dukungan politik. Dukungan politik dari pemimpin nasional dan lokal memainkan peran penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan ekonomi. Kebijakan yang didukung secara politik cenderung mendapatkan sumber daya dan perhatian yang lebih besar, sehingga lebih mudah diimplementasikan. Dukungan politik sering kali menjadi penentu utama keberhasilan implementasi kebijakan. Penelitian ini mengkonfirmasi bahwa kebijakan yang didukung secara politik cenderung lebih berhasil (Sabatier, P. A., & Mazmanian, D, 1980). (v) Pengawasan dan evaluasi. Pengawasan dan evaluasi yang terus menerus merupakan elemen penting dalam memastikan kebijakan ekonomi diterapkan dengan baik. Mekanisme pengawasan yang kuat membantu mengidentifikasi masalah dan mengambil tindakan korektif dengan cepat. Pengawasan dan evaluasi yang efektif membantu memastikan kebijakan diterapkan dengan baik dan memungkinkan perbaikan yang berkelanjutan. Temuan ini mendukung literatur yang menekankan pentingnya mekanisme pengawasan dalam implementasi kebijakan (Patton, M. Q, 2008).

Implementasi kebijakan ekonomi nasional di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk keterlibatan pemangku kepentingan, koordinasi antar instansi, kapabilitas institusional, dukungan politik, dan pengawasan yang efektif. Memperkuat faktor-faktor ini dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan ekonomi dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

Berbagai negara telah mencoba menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kebijakan ekonomi nasional mereka. Misalnya, Malaysia telah menerapkan konsep-konsep ekonomi Islam melalui pembentukan lembaga keuangan Islam, seperti bank syariah dan perusahaan asuransi syariah. Di sisi lain, Arab Saudi telah memperkuat hukum dan regulasi yang berbasis pada hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi, termasuk perdagangan dan investasi.

Beberapa negara dengan mayoritas penduduk Muslim telah mencoba menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kebijakan ekonomi nasional mereka. Misalnya, Malaysia telah berhasil membangun lembaga-lembaga keuangan Islam yang kuat, seperti bank syariah dan perusahaan asuransi syariah. Ini menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif dan berbasis pada prinsip-prinsip keadilan ekonomi.

Di sisi lain, Arab Saudi telah memperkuat hukum dan regulasi yang berbasis pada hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi. Hal ini mencakup pengaturan perdagangan, investasi, dan praktik bisnis yang mengikuti prinsip-prinsip Islam. Implementasi ini menunjukkan komitmen negara-negara tersebut untuk membangun ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai agama mereka.

3. Praktik Bisnis yang Mencerminkan Nilai-Nilai Akhlaq Islami

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai akhlaq Islami diimplementasikan dalam praktik bisnis. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis prinsip-prinsip etika Islam yang diterapkan dalam operasi bisnis sehari-hari oleh perusahaan-perusahaan yang berkomitmen pada nilai-nilai syariah.

Adapun hasil penelitian praktik bisnis yang mencerminkan nilai-nilai akhlaq Islami antara lain sebagai berikut: (i)

1. Keadilan dan kejujuran.

Nilai-nilai keadilan (*'adl*) dan kejujuran (*sidq*) sangat terlihat dalam kebijakan dan praktik bisnis perusahaan yang diteliti. Wawancara menunjukkan bahwa perusahaan berusaha memastikan bahwa semua transaksi dilakukan secara adil dan transparan, menghindari praktik curang atau manipulatif. Kebijakan perusahaan secara tegas melarang segala bentuk penipuan dan mendorong transparansi dalam komunikasi dengan pelanggan dan mitra bisnis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai keadilan dan kejujuran dalam bisnis tidak hanya meningkatkan reputasi perusahaan tetapi juga membangun kepercayaan yang kuat di antara pemangku kepentingan. Ini sejalan dengan literatur yang menekankan bahwa etika bisnis yang berlandaskan kejujuran dan keadilan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan loyalitas (Abuznaid, S, 2009). (ii) Amanah (kepercayaan). Konsep amanah atau kepercayaan menjadi prinsip kunci dalam hubungan bisnis. Perusahaan mengutamakan tanggung jawab dalam menjaga kepercayaan yang diberikan oleh pelanggan, karyawan, dan mitra bisnis. Hal ini tercermin dalam komitmen perusahaan untuk memenuhi janji dan kewajiban mereka tepat waktu dan sesuai dengan kesepakatan. Praktik amanah dalam bisnis memastikan adanya kepercayaan yang berkelanjutan, yang merupakan fondasi dari hubungan bisnis yang sukses. Studi sebelumnya juga menunjukkan bahwa kepercayaan adalah elemen kunci dalam hubungan bisnis yang berkelanjutan (Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I, 2007). (iii) Kesejahteraan sosial (*maslahah*). Prinsip masalah atau kesejahteraan sosial menjadi salah satu nilai utama yang dipraktikkan. Perusahaan tidak hanya fokus pada keuntungan finansial tetapi juga memperhatikan dampak sosial dari kegiatan bisnis mereka. Program tanggung jawab sosial perusahaan (*'CSR'*) sering kali diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti melalui donasi, pendidikan, dan program kesehatan. Fokus pada masalah menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga berusaha memberikan dampak positif bagi masyarakat. Pendekatan ini didukung oleh teori-teori tentang tanggung jawab sosial perusahaan yang menganggap bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan sosial (Carroll, A. B, 1991). (iv) Kesederhanaan (*zuhud*). Perusahaan mengadopsi prinsip kesederhanaan (*'zuhud'*) dengan menghindari perilaku boros dan pemborosan sumber daya. Ini tercermin dalam kebijakan internal yang mendorong efisiensi dan keberlanjutan, seperti penggunaan sumber daya yang bijaksana dan pengelolaan limbah yang efektif. Penerapan prinsip kesederhanaan dalam bisnis membantu perusahaan mengelola sumber daya dengan lebih efisien dan mengurangi biaya operasional. Penelitian ini mendukung pandangan bahwa kesederhanaan dan efisiensi operasional dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan (Elkington, J, 1998). (v) Kerjasama (*ta'awun*). Prinsip

ta'awun atau kerjasama juga diterapkan dalam operasi bisnis. Perusahaan mendorong kolaborasi dan saling membantu antar karyawan serta dengan mitra bisnis. Budaya perusahaan dibangun di atas nilai saling mendukung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Nilai ta'awun mendorong budaya kerja yang kolaboratif, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas dan kepuasan karyawan. Studi sebelumnya juga menunjukkan bahwa lingkungan kerja yang kolaboratif dapat meningkatkan kinerja tim dan hasil bisnis (Tjosvold, D, 1988).

Penelitian ini mengidentifikasi lima prinsip utama nilai-nilai akhlaq Islami yang diterapkan dalam praktik bisnis: keadilan dan kejujuran, amanah, kesejahteraan sosial, kesederhanaan, dan kerjasama. Implementasi nilai-nilai ini tidak hanya membantu perusahaan dalam membangun reputasi yang baik tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan ekonomi yang lebih luas. Memperkuat penerapan nilai-nilai akhlaq Islami dalam bisnis dapat menjadi strategi yang efektif untuk mencapai keberlanjutan dan kesuksesan jangka panjang.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman tentang bagaimana nilai-nilai akhlaq Islami dapat diintegrasikan dalam praktik bisnis, menawarkan wawasan yang berharga bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan. Dalam sektor bisnis, terdapat banyak contoh praktik yang mencerminkan nilai-nilai akhlaq Islami dan hukum Islam. Beberapa perusahaan telah mengadopsi model bisnis yang berorientasi pada prinsip keadilan dan keberkahan, seperti memberikan zakat (sumbangan amal) dari keuntungan mereka dan memprioritaskan kepentingan masyarakat dalam pengambilan keputusan bisnis.

Prinsip-prinsip keadilan distributif juga dapat mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, implementasi ekonomi berbasis akhlaq Islami juga dapat memperkuat ikatan sosial dan moral dalam masyarakat, sehingga menciptakan fondasi yang lebih kuat untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Meskipun ada upaya yang signifikan dalam menerapkan ekonomi berbasis akhlaq Islami dan hukum Islam, masih terdapat sejumlah tantangan dan hambatan. Salah satunya adalah ketidaksesuaian dengan sistem ekonomi global yang dominan, di mana prinsip-prinsip ekonomi Islam sering kali bertentangan dengan praktik-praktik yang berlaku secara umum. Selain itu, kekurangan pemahaman dan kesadaran tentang nilai-nilai akhlaq Islami juga menjadi hambatan dalam mengimplementasikannya secara luas.

Meskipun terdapat upaya yang signifikan dalam menerapkan ekonomi berbasis akhlaq Islami dan hukum Islam, terdapat sejumlah tantangan yang perlu dihadapi. Salah satunya adalah ketidaksesuaian dengan sistem ekonomi global yang dominan, di mana prinsip-prinsip ekonomi Islam sering kali bertentangan dengan praktik-praktik yang berlaku secara umum.

Selain itu, kekurangan pemahaman dan kesadaran tentang nilai-nilai akhlaq Islami juga menjadi hambatan dalam mengimplementasikannya secara luas. Diperlukan edukasi

dan sosialisasi yang lebih baik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya ekonomi berbasis akhlaq Islami.

4. Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi

Untuk memberikan penjelasan hasil penelitian dan pembahasan deskriptif kualitatif tentang tantangan dan hambatan dalam implementasi suatu konsep atau prinsip tertentu, seperti nilai-nilai akhlaq Islami dan hukum Islam, kita dapat mengambil pendekatan yang struktural dan mendalam. Berikut adalah contoh penjelasan yang bisa diberikan:

Studi ini bertujuan untuk menyelidiki tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi nilai-nilai akhlaq Islami dan hukum Islam dalam berbagai konteks kehidupan. Fokus utama adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam menerapkan nilai-nilai ini serta dampaknya terhadap individu, masyarakat, dan institusi yang terlibat.

Adapun tantangan dan hambatan dalam implementasi pembangunan ekonomi nasional dengan landasan akhlaq Islami dan hukum Islam antara lain sebagai berikut: (i) Tantangan dalam pemahaman dan interpretasi. Salah satu tantangan utama yang diidentifikasi adalah variasi dalam pemahaman dan interpretasi terhadap nilai-nilai akhlaq Islami dan hukum Islam. Berbagai komunitas atau kelompok masyarakat sering memiliki sudut pandang yang berbeda tentang bagaimana prinsip-prinsip ini harus diimplementasikan dalam konteks mereka masing-masing. Perbedaan ini dapat menyebabkan konflik interpretasi yang dapat menghambat konsistensi dalam implementasi. Perbedaan dalam pemahaman dan interpretasi terhadap nilai-nilai akhlaq Islami dapat menyulitkan upaya untuk mencapai konsensus atau kesepakatan dalam aplikasi praktisnya. Penting untuk mendorong dialog antar kelompok dan pendekatan yang inklusif untuk mengatasi perbedaan ini. (ii) Hambatan dalam konteks hukum dan kebijakan. Implementasi nilai-nilai akhlaq Islami dan hukum Islam sering kali menghadapi hambatan dalam konsistensi dengan kerangka hukum nasional atau internasional yang ada. Misalnya, dalam sistem hukum yang dominan sekuler, integrasi prinsip-prinsip hukum Islam seperti syariah dapat menimbulkan tantangan dalam harmonisasi antara hukum agama dan hukum negara. Konsistensi dengan kerangka hukum yang ada dapat menjadi kompleksitas tersendiri dalam implementasi prinsip-prinsip hukum Islam. Ini menekankan perlunya reformasi hukum yang sesuai untuk mendukung integrasi nilai-nilai agama dalam sistem hukum yang lebih luas. (iii) Konteks sosial dan ekonomi yang berubah. Perubahan sosial dan ekonomi yang cepat juga menjadi faktor utama dalam menghadapi tantangan dalam implementasi nilai-nilai akhlaq Islami dan hukum Islam. Globalisasi, modernisasi, dan urbanisasi dapat mempengaruhi cara nilai-nilai ini diterapkan dan diinterpretasikan dalam masyarakat yang berubah dengan cepat. Perubahan sosial dan ekonomi memerlukan adaptasi dalam cara nilai-nilai akhlaq Islami dan hukum Islam diinterpretasikan dan diterapkan dalam praktik sehari-hari. Ini menunjukkan perlunya respons dan inovasi dalam menghadapi tantangan kontemporer. (iv) Ketidakpastian politik dan budaya. Ketidakpastian politik dan budaya di beberapa konteks

<https://ojs.staisdharma.ac.id/index.php/tjmes>



regional atau nasional juga menjadi hambatan signifikan. Faktor-faktor ini meliputi perubahan rezim politik, konflik etnis atau agama, serta perbedaan budaya yang dapat mempengaruhi penerimaan dan implementasi nilai-nilai ini dalam masyarakat. Ketidakpastian dalam konteks politik dan budaya dapat mempengaruhi penerimaan dan implementasi prinsip-prinsip ini. Strategi yang sensitif terhadap dinamika politik dan budaya lokal diperlukan untuk memfasilitasi integrasi yang harmonis. (v) Kesadaran dan pendidikan masyarakat. Kurangnya kesadaran dan pendidikan masyarakat tentang nilai-nilai akhlaq Islami dan hukum Islam juga merupakan tantangan besar. Pendidikan yang lebih baik dan kampanye penyadaran diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip ini, sehingga mendukung implementasi yang lebih luas dan efektif. Upaya pendidikan dan kampanye kesadaran masyarakat dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan pemahaman dan penerimaan terhadap nilai-nilai akhlaq Islami. Ini dapat membantu mengurangi kesenjangan dalam pengetahuan dan mempromosikan aplikasi yang lebih luas dalam masyarakat.

Penelitian ini menyoroti bahwa implementasi nilai-nilai akhlaq Islami dan hukum Islam dihadapi oleh berbagai tantangan dan hambatan yang kompleks, yang meliputi perbedaan interpretasi, ketidaksesuaian dengan kerangka hukum dan kebijakan yang ada, perubahan sosial dan ekonomi yang cepat, ketidakpastian politik dan budaya, serta kurangnya kesadaran dan pendidikan masyarakat. Mengatasi tantangan ini memerlukan pendekatan yang komprehensif, kolaboratif, dan responsif terhadap dinamika konteks lokal dan global.

Penjelasan ini memberikan pandangan yang komprehensif tentang tantangan dan hambatan dalam implementasi nilai-nilai akhlaq Islami dan hukum Islam, serta menunjukkan pentingnya strategi yang beragam untuk mengatasi kompleksitas yang terlibat dalam aplikasi praktisnya. Implementasi prinsip-prinsip Akhlaq Islami dan Hukum Islam dalam praktik ekonomi tidaklah mudah, dan menghadapi tantangan dan hambatan. Beberapa tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi prinsip-prinsip tersebut antara lain: (i) Kurangnya kesadaran Kurangnya kesadaran tentang prinsip-prinsip Akhlaq Islami dan Hukum Islam menjadi penghambat dalam implementasinya. Beberapa pengusaha atau pelaku bisnis belum memahami secara utuh prinsip-prinsip tersebut sehingga tidak terlalu memperhatikan aspek etika dan moral dalam praktik bisnis. (ii) Kompetisi yang tidak sehat dalam dunia bisnis Kompetisi yang tidak sehat dalam dunia bisnis juga menjadi kendala dalam implementasi prinsip-prinsip Akhlaq Islami dan Hukum Islam. Beberapa pelaku bisnis mengutamakan persaingan yang keras untuk meraih keuntungan tanpa memperhatikan nilai-nilai etis dan sosial. (iii) Tidak adanya regulasi yang cukup Tidak adanya regulasi yang cukup dari pemerintah atau badan pengawas menjadi hambatan dalam implementasi prinsip-prinsip Akhlaq Islami dan Hukum Islam dalam praktik ekonomi. Aturan yang buruk atau kurang jelas dapat memberikan celah bagi pekerjaan yang tidak etis dan kurang memperhatikan keadilan sosial ekonomi. (iv) Tidak adanya insentif yang cukup bagi pelaku bisnis yang menerapkan prinsip Akhlaq Islami Tidak adanya insentif yang cukup bagi pelaku bisnis yang menerapkan prinsip Akhlaq Islami juga menjadi kendala dalam

<https://ojs.staisdharma.ac.id/index.php/tjmes>



implementasi prinsip-prinsip tersebut. Banyak pelaku bisnis yang tidak merasa terdorong untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut karena tidak melihat manfaat yang diperoleh dari penerapannya. (v) Tidak mudahnya mencari mitra bisnis yang memiliki prinsip yang sama Tidak mudahnya mencari mitra bisnis yang memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Akhlaq Islami dan Hukum Islam seringkali menjadi kendala bagi orang-orang yang ingin menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik bisnis mereka. Hal ini dapat mencegah pengembangan bisnis yang bertanggung jawab secara etis dan moral. (vi) Perbedaan interpretasi dari prinsip-prinsip Akhlaq Islami dan Hukum Islam Anggapan yang berbeda-beda tentang prinsip-prinsip Akhlaq Islami dan Hukum Islam dapat menghambat untuk mencapai kesepakatan dalam penerapannya. Hal ini dapat mengganggu praktik bisnis yang mengikuti persetujuan bersama atas prinsip-prinsip tersebut.

Meskipun menghadapi tantangan, pembangunan ekonomi nasional dengan landasan akhlaq Islami dan hukum Islam memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat yang signifikan. Salah satunya adalah terciptanya sistem keuangan yang lebih stabil dan berkelanjutan, di mana praktik-praktik spekulatif dan eksploitatif dapat dihindari.

Dalam kesimpulannya, implementasi prinsip-prinsip Akhlaq Islami dan Hukum Islam dalam praktik ekonomi menghadapi tantangan dan hambatan yang perlu diatasi. Adanya kesadaran yang lebih tinggi dan regulasi yang memadai dari pemerintah dapat membantu dalam mengatasi tantangan tersebut. Selain itu, adanya keinginan untuk memperbaiki reputasi bisnis dan mempertahankan model bisnis yang berkelanjutan juga dapat menjadi motivasi bagi pelaku bisnis agar menerapkan prinsip-prinsip Akhlaq Islami dalam praktik bisnis mereka.

5. Dampak Positif dan Manfaat Ekonomi Berbasis Akhlaq Islami dan Hukum Islam

Implementasi prinsip-prinsip Akhlaq Islami dan Hukum Islam dalam praktik ekonomi diharapkan dapat membawa dampak positif dan manfaat bagi pengembangan ekonomi dan masyarakat. Beberapa dampak positif dan manfaatnya antara lain: (i) Kesetaraan dan keadilan dalam pembagian sumber daya Implementasi prinsip-prinsip Akhlaq Islami dan Hukum Islam dalam praktik ekonomi dapat memberikan perlindungan bagi kelompok-kelompok yang rentan seperti orang miskin dan kaum minoritas. Kelompok-kelompok tersebut akan mendapatkan akses yang sama dan bersaing dengan adil untuk mendapatkan sumber daya dan peluang ekonomi. (ii) Peningkatan kualitas pelayanan dan produk yang dihasilkan Akhlaq Islami dan Hukum Islam mendorong para pengusaha untuk memproduksi dan memberikan pelayanan dengan nilai-nilai kejujuran, keadilan, amanah dan kesopanan. Hal ini dapat meningkatkan kualitas barang dan jasa yang dihasilkan serta dapat menjaga kepercayaan konsumen. (iii) Peningkatan keberlanjutan dan pengelolaan lingkungan yang baik Prinsip-prinsip Akhlaq Islami dan Hukum Islam mendorong untuk memikirkan dampak jangka panjang dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam. Dengan demikian, implementasi prinsip-prinsip tersebut akan menjaga keberlanjutan dan pengelolaan lingkungan yang baik dalam jangka panjang. (iv) Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor Implementasi prinsip-prinsip Akhlaq Islami dan Hukum Islam

<https://ojs.staisdharma.ac.id/index.php/times>



dalam praktik ekonomi mendorong pengusaha untuk bekerja dengan nilai-nilai etis yang baik. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor di mana proses bisnis akan dijalankan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. (v) Meningkatkan rasa tanggung jawab sosial Praktik bisnis yang melibatkan nilai-nilai Akhlaq Islami dan Hukum Islam juga mendorong pengusaha dan perusahaan untuk berpartisipasi dalam program-program sosial dan mengambil tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Hal ini akan membantu meningkatkan kesejahteraan sosial dan keadilan dalam masyarakat.

Meskipun menghadapi tantangan, penelitian ini menemukan bahwa pembangunan ekonomi nasional dengan landasan akhlaq Islami dan hukum Islam dapat memberikan dampak positif yang signifikan. Salah satunya adalah terciptanya sistem keuangan yang lebih stabil dan berkelanjutan, di mana praktik-praktik spekulatif dan eksploitatif dapat dihindari. Selain itu, prinsip-prinsip keadilan distributif juga dapat mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam kesimpulannya, implementasi prinsip-prinsip Akhlaq Islami dan Hukum Islam dalam praktik ekonomi dapat membawa dampak positif dan manfaat bagi pengembangan ekonomi dan masyarakat, di antaranya kesetaraan dan keadilan dalam pembagian sumber daya, peningkatan kualitas pelayanan dan produk, pengelolaan lingkungan yang baik, meningkatkan rasa tanggung jawab sosial dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor. Implementasi prinsip-prinsip ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial ekonomi bagi seluruh anggota masyarakat.

6. Rekomendasi untuk Masa Depan

Berdasarkan pembahasan ini, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk mengoptimalkan pembangunan ekonomi nasional dengan landasan akhlaq Islami dan hukum Islam. Salah satunya adalah perlunya peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang nilai-nilai akhlaq Islami di kalangan masyarakat dan pemangku kepentingan.

Selain itu, kolaborasi antar negara dalam berbagi pengalaman dan praktik terbaik juga dapat memperkuat implementasi ekonomi berbasis akhlaq Islami. Diperlukan juga dukungan yang kuat dari pemerintah, sektor bisnis, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai moral dan etis.

Dengan mempertimbangkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi nasional dengan landasan akhlaq Islami dan hukum Islam memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan. Namun, untuk mencapai potensi tersebut, diperlukan upaya yang terkoordinasi dan komprehensif dari berbagai pihak terkait. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi pijakan untuk terus memperbaiki dan mengembangkan pendekatan ekonomi yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan berlandaskan pada nilai-nilai etis dan moral.

Pembangunan ekonomi nasional dengan landasan akhlaq Islami dan hukum Islam menawarkan sebuah paradigma yang menarik dalam mengatasi tantangan-tantangan ekonomi yang kompleks. Dengan memperkuat implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kebijakan ekonomi nasional, negara-negara dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, stabil, dan berkelanjutan. Namun, untuk mencapai potensi penuhnya, diperlukan upaya yang terkoordinasi dan komprehensif dari berbagai pihak terkait. Dengan demikian, pembahasan ini dapat menjadi landasan untuk terus memperbaiki dan mengembangkan pendekatan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan berlandaskan pada nilai-nilai etis dan moral.

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk mengoptimalkan pembangunan ekonomi nasional dengan landasan akhlaq Islami dan hukum Islam. Salah satunya adalah perlunya peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang nilai-nilai akhlaq Islami di kalangan masyarakat dan pemangku kepentingan. Selain itu, kolaborasi antar negara dalam berbagi pengalaman dan praktik terbaik juga dapat memperkuat implementasi ekonomi berbasis akhlaq Islami.

Pembangunan ekonomi nasional dengan landasan akhlaq Islami dan hukum Islam merupakan sebuah paradigma yang menarik dalam memandang pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan. Konsep ini mengajak untuk mempertimbangkan aspek moral dan etis dalam setiap aspek kegiatan ekonomi, serta mengacu pada prinsip-prinsip yang diatur oleh ajaran agama Islam. Dalam pembahasan ini, kita akan menjelajahi berbagai aspek penting dari membangun ekonomi nasional dengan landasan akhlaq Islami dan hukum Islam, termasuk konsep-konsep dasar, implementasi dalam kebijakan ekonomi, tantangan yang dihadapi, dan potensi manfaat yang dapat diperoleh.

Simpulan

Membangun ekonomi nasional dengan landasan akhlaq Islami dan hukum Islam menjadi semakin relevan dalam menghadapi kompleksitas tantangan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dihadapi oleh banyak negara. Dalam pembahasan ini, kita telah menjelajahi berbagai aspek penting dari membangun ekonomi nasional dengan landasan akhlaq Islami dan hukum Islam, termasuk konsep-konsep dasar, implementasi dalam kebijakan ekonomi, tantangan yang dihadapi, dan potensi manfaat yang dapat diperoleh. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

1. Konsep-konsep ekonomi berbasis akhlaq Islami dan hukum Islam, seperti kepemilikan bersama, keadilan distributif, dan larangan riba, memiliki relevansi yang kuat dalam konteks pembangunan ekonomi nasional. Prinsip-prinsip ini menawarkan kerangka kerja yang mempertimbangkan aspek moral dan etis dalam setiap aspek kegiatan ekonomi.
2. Beberapa negara telah mencoba menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kebijakan ekonomi nasional mereka, meskipun masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu dihadapi. Implementasi ini mencakup pembentukan lembaga-lembaga keuangan

Islam, pengaturan hukum dan regulasi yang berbasis pada hukum Islam, dan praktik bisnis yang mencerminkan nilai-nilai akhlaq Islami.

3. Tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan ekonomi berbasis akhlaq Islami meliputi ketidaksesuaian dengan sistem ekonomi global yang dominan, kekurangan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai akhlaq Islami, dan tantangan dalam menyeimbangkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan kebutuhan ekonomi modern.
4. Meskipun menghadapi tantangan, pembangunan ekonomi nasional dengan landasan akhlaq Islami dan hukum Islam memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat yang signifikan. Ini termasuk terciptanya sistem keuangan yang lebih stabil dan berkelanjutan, pengurangan ketimpangan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penguatan ikatan sosial dan moral dalam masyarakat.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran dapat diajukan untuk mengoptimalkan pembangunan ekonomi nasional dengan landasan akhlaq Islami dan hukum Islam:

1. Penguatan pendidikan dan kesadaran. Penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai akhlaq Islami dan prinsip-prinsip ekonomi Islam melalui pendidikan formal dan informal. Hal ini dapat dilakukan melalui penyertaan materi-materi terkait dalam kurikulum pendidikan, pelatihan untuk para pemangku kepentingan, dan kampanye publik yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya ekonomi berbasis akhlaq Islami.
2. Kolaborasi antar negara. Negara-negara yang memiliki kebijakan ekonomi berbasis akhlaq Islami dapat meningkatkan kolaborasi dan pertukaran pengalaman dalam implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam. Ini dapat dilakukan melalui pembentukan forum regional atau internasional, pertukaran delegasi, dan kerja sama dalam penelitian dan pengembangan.
3. Penguatan institusi keuangan Islam. Penting untuk terus memperkuat lembaga-lembaga keuangan Islam, seperti bank syariah, perusahaan asuransi syariah, dan pasar modal syariah. Hal ini meliputi penyediaan infrastruktur yang memadai, kebijakan yang mendukung, dan inovasi produk yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
4. Inovasi dalam praktik bisnis. Para pelaku bisnis dan pengusaha perlu terus mendorong inovasi dalam praktik bisnis yang mencerminkan nilai-nilai akhlaq Islami. Hal ini dapat meliputi penerapan prinsip keadilan dalam penggajian dan manajemen sumber daya manusia, penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi bisnis dengan tetap memperhatikan keberkahan, dan pengembangan produk dan layanan yang memperhatikan kepentingan masyarakat.

5. Peran pemerintah yang aktif. Pemerintah perlu memainkan peran yang aktif dalam memfasilitasi pembangunan ekonomi berbasis akhlaq Islami. Ini mencakup penyusunan kebijakan yang mendukung, pemberian insentif bagi pelaku bisnis yang menerapkan praktik bisnis yang etis, dan pembentukan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi praktik bisnis.

Dengan mengimplementasikan saran-saran di atas, diharapkan pembangunan ekonomi nasional dengan landasan akhlaq Islami dan hukum Islam dapat menjadi lebih efektif dan berdampak positif bagi masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan. Dengan kerjasama yang kuat antara berbagai pihak terkait, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil, berkelanjutan, dan sejahtera sesuai dengan prinsip-prinsip agama.

Daftar Pustaka

- Abuznaid, S. (2009). Business ethics in Islam: The glaring gap in practice. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 2 (4), 278–288.
- Bappenas. (2018). *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024: Hasil Kajian Analisis Ekonomi Syariah di Indonesia*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Carroll, A. B. (1991). The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders. *Business Horizons*, 34 (4), 39–48.
- Chapra, M. U. (2000). *Islam and the Economic Challenge*. Islamic Foundation.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-Shari'ah, masalah, and corporate social responsibility. *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 24 (1), 25–45.
- El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge University Press.
- Elkington, J. (1998). *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*. New Society Publishers.
- Fischer, F. (2003). *Reframing Public Policy: Discursive Politics and Deliberative Practices*. Oxford University Press.
- Grindle, M. S., & Thomas, J. W. (1991). *Public Choices and Policy Change: The Political Economy of Reform in Developing Countries*. Johns Hopkins University Press.
- Hasan, A., Shafira, D. S., Azfa, N., Nurainuniisa, S., & Faturrahman. (2024). Problematika Sistem Ekonomi Islam Di Indonesia. *Jurnal Al-Idārah*, Volume 5, No 1.
- J. Moleong, L. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Kahf, M. (1999). The Performance of the Institution of Zakah in Theory and Practice. *International Journal of Islamic Financial Services*, 1 (1).
- Leavy, Patricia (ed.). (2020). *The Oxford Handbook of Qualitative Research* (2nd edn). Oxford Handbooks. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190847388.001.0001>
- Lewis, M. K., & Latifa M, A. (2001). *Islamic Banking*. Edward Elgar Publishing.



<https://ojs.staisdharma.ac.id/index.php/times>



- Maria Helena Andre, et. all. (2018). *Tujuan Pembangunan Millenium; Referensi Manual Serikat Pekerja pada Agenda untuk Pembangunan Berkelanjutan 2030/ Organisasi Perburuhan Internasional*. Kantor Jakarta: ILO.
- Maulana, M. (2020). *Model Transaksi Ekonomi Kontemporer Dalam Islam*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh.
- Patton, M. Q. (2008). *Utilization Focused Evaluation*. Sage Publications.
- Pressman, J. L., & Wildavsky, A. B. (1984). *Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland*. University of California Press.
- Putra, M. D. (2021). Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Perspektif Pancasila. *Likhitaprajna: Jurnal Ilmiah*, Volume 23, Nomor 2. <https://media.neliti.com/media/publications/501075-none432e7d02.pdf>
- Rofiqoh, I., & Zulhawati. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sabatier, P. A., & Mazmanian, D. (1980). The Implementation of Public Policy: A Framework of Analysis. *Policy Studies Journal*, 8 (4).
- Siddiqi, M. N. (1981). *Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature*. International Centre for Research in Islamic Economics.
- Suradi. (2012). Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Sosial (Economic Growth And Sosial Welfare). *Informasi*, Vol. 17, No. 03. <https://media.neliti.com/media/publications/52806-ID-pertumbuhan-ekonomi-dan-kesejahteraan-so.pdf>
- Tjosvold, D. (1988). Cooperative and competitive interdependence: Collaboration between departments to serve customers. *Group & Organization Studies*, 13 (3), 274-289.
- Warde, I. (2000). *Islamic Finance in the Global Economy*. Edinburgh University Press.